

Strategi PMPP TNI Dalam Meningkatkan Kesiapan Kontingen Garuda Indonesia Guna Memperkuat Diplomasi Pertahanan pada Misi Perdamaian Dunia PBB

Elson Dwi Septianta¹ Arifuddin Uksan² Yudi Subiantoro³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Email: elson.septianta52@gmail.com¹ arifuddinuksan123@gmail.com²
yudisubiantoro.mail@gmail.com³

Abstrak

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI merupakan Lembaga yang menyiapkan pasukan perdamaian dunia yang akan tergabung dalam Misi PBB, sehingga perlu adanya penelitian yang dilakukan yang bertujuan menganalisis strategi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dalam meningkatkan kesiapan Kontingen Indonesia guna memperkuat diplomasi pertahanan pada misi perdamaian dunia PBB. Fokus kajian diarahkan pada tiga objek rumusan masalah yaitu mekanisme strategi peningkatan kesiapan, identifikasi tantangan internal dan eksternal, serta pengaruh keberhasilan strategi operasional terhadap penguatan diplomasi pertahanan negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kontemporer dengan desain studi kasus berdasarkan kerangka metodologis John W. Creswell dan Robert K. Yin. Subjek penelitian ditetapkan secara spesifik pada institusi PMPP TNI sebagai episentrum pembinaan. Teknik pengumpulan data dilakukan terintegrasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMPP TNI menerapkan strategi komprehensif meliputi standarisasi pelatihan pra penugasan berbasis UNPCRS, seleksi kompetensi multidimensi, serta pemenuhan alutsista industri domestik standar Statement of Unit Requirements (SUR) PBB. Meskipun dihadapkan pada tantangan internal berupa keterbatasan infrastruktur diklat dan regulasi anggaran, serta tantangan eksternal berupa konflik asimetris, strategi penyiapan ini terbukti memberikan pengaruh signifikan. Kesiapan pasukan yang tinggi berhasil dikonversi menjadi modal kepercayaan internasional yang mendongkrak posisi Indonesia di fora multilateral PBB, sekaligus menciptakan multiplier effect berupa peningkatan penempatan perwira tinggi TNI pada jabatan kepemimpinan strategis di struktur misi dunia.

Kata Kunci: Strategi PMPP TNI, Kesiapan Kontingen, Diplomasi Pertahanan, Misi Perdamaian PBB

Abstract

Indonesian National Armed Forces (TNI) Peacekeeping Mission Center is an institution tasked with preparing peacekeeping forces for deployment in United Nations (UN) missions; therefore, research needs to be conducted to support and enhance to analyse the strategies of the Indonesian National Armed Forces' Peacekeeping Mission Centre (PMPP) in enhancing the readiness of the Indonesian Contingent to strengthen defence diplomacy in UN peacekeeping missions. The focus of the study is directed at three research questions: the strategic mechanisms for enhancing readiness, the identification of internal and external challenges, and the impact of successful operational strategies on the strengthening of the country's defence diplomacy. The research method employs a contemporary descriptive qualitative approach with a case study design based on the methodological framework of John W. Creswell and Robert K. Yin. The research subject is specifically defined as the TNI PMPP institution as the epicentre of development. Data collection techniques are integrated through in-depth interviews, field observations, and documentary studies, whilst data validity is tested through source triangulation. The research findings indicate that the TNI PMPP implements a comprehensive strategy encompassing UNPCRS-based pre-deployment training standardisation, multidimensional competency selection, and the procurement of domestic defence equipment that meets the UN Statement of Unit Requirements (SUR) standards. Despite facing internal challenges such as limited training infrastructure and budgetary constraints, as well as external challenges in the form of asymmetric conflicts, this preparation strategy has proven to have a significant impact. The high level of troop readiness has successfully been converted into international trust, bolstering Indonesia's position in UN multilateral forums, whilst simultaneously creating a multiplier

effect in the form of increased placement of senior TNI officers in strategic leadership positions within global mission structures.

Keywords: *The Indonesian National Armed Forces' PMPP Strategy, Contingent Readiness, Defence Diplomacy, UN Peacekeeping Missions*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas operasi pemeliharaan perdamaian PBB pada era konflik multidimensional menuntut setiap negara kontributor pasukan untuk tidak hanya menyediakan personel, tetapi juga menjamin kualitas kesiapan, interoperabilitas, dan profesionalisme kontingen sesuai standar *United Nations Peacekeeping Operations* (Department of Peace Operations, 2020). Lingkungan strategis operasi perdamaian dunia saat ini tengah mengalami transformasi radikal yang ditandai dengan munculnya krisis iklim, proliferasi teknologi destruktif, polarisasi geopolitik, serta kebangkitan aktor bersenjata non-negara (United Nations, 2026). Dinamika ini mengaburkan batas tradisional antara kondisi perang dan damai, sehingga memicu fase penurunan drastis (retrenchment) dalam arsitektur perdamaian global. Sejak tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak lagi memberikan mandat untuk pembukaan misi perdamaian multidimensional yang baru, sementara beberapa misi besar di Mali (MINUSMA) dan Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) dipaksa untuk melakukan penarikan pasukan akibat pencabutan persetujuan dari pemerintah negara tuan rumah (*host state consent*) (Campbell & Cunningham, 2025). Fenomena penciptaan penugasan global ini melahirkan implikasi serius bagi negara-negara penyedia pasukan atau *Troop Contributing Countries* (TCCs). Di bawah tekanan keterbatasan anggaran dan desakan akuntabilitas dari Dewan Keamanan, Departemen Operasi Perdamaian PBB (UN DPO) menerapkan kebijakan evaluasi kinerja yang sangat ketat melalui resolusi-resolusi seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2436. Standar ini menuntut akuntabilitas penuh atas performa taktis, kesiapan logistik, disiplin personel, serta integrasi agenda strategis seperti perlindungan warga sipil dan *Women, Peace, and Security* (WPS) (UN Peacekeeping, 2026).

Bagi Indonesia, partisipasi aktif dalam operasi pemeliharaan perdamaian bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap amanat konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, melainkan pilar strategis diplomasi pertahanan (Kusuma & Husain, 2025). Kontribusi ini berfungsi sebagai instrumen proyeksi kekuatan nir-tempur (*soft power*) untuk meningkatkan daya tawar geopolitik negara di forum multilateral. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) mengemban tanggung jawab vital sebagai institusi hulu yang mengelola rekrutmen, pelatihan praturgus, pembinaan disiplin, dan penyiapan logistik Kontingen Garuda sebelum diterjunkan ke daerah misi (Sriyanto, 2022). Dalam proses penyiapan tersebut, PMPP TNI dihadapkan pada berbagai kendala operasional yang sangat spesifik dan memengaruhi kelaikan taktis di lapangan. Berdasarkan evaluasi kelayakan peralatan (*Contingent Owned Equipment/COE*) dan inspeksi efektivitas operasional di daerah misi, Kontingen Garuda kerap menghadapi degradasi fisik alutsista yang termakan usia serta keterlambatan rotasi material (Sriyanto, 2022). Hambatan ini diperparah oleh ketiadaan unit pengadaan barang mandiri di bawah direktorat logistik PMPP TNI, yang menghambat proses pengadaan suku cadang kritis di daerah misi. Di sektor infrastruktur domestik, proses penyiapan pasukan dihambat oleh kerusakan sistem CCTV pemantau taktis, kerusakan sarana desa simulasi, serta ketiadaan simulator Ranpur Anoa yang memaksa lembaga latihan meminjam dari satuan operasional lain. Pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan

sertifikasi instruktur berstandar PBB serta rendahnya kompetensi penguasaan bahasa Inggris militer khusus (*English for Specific Military Purposes/ESMP*) di kalangan prauprit non-perwira menjadi kelemahan mendasar yang memicu kendala koordinasi taktis dalam lingkungan operasi multinasional (Suparman, 2023).

Hambatan taktis tersebut berkelindan dengan kendala strategis pada tataran kebijakan dan regulasi nasional. Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam menyelaraskan postur penyiapan pasukannya dengan mekanisme *United Nations Peacekeeping Capability Readiness System* (UNPCRS) yang menuntut pengerahan pasukan siaga cepat (*standby forces*) secara fleksibel. Hambatan regulatif ini bersumber dari keterbatasan cakupan hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 yang belum mampu memayungi dinamika pengerahan pasukan siaga cepat. Akibat rigiditas aturan domestik ini, beberapa inisiatif kemitraan strategis dengan negara donor maju seperti Australia, Jepang, dan Ethiopia untuk melakukan pengerahan bersama (*combined deployment*) terpaksa terhenti karena lambatnya sistem pengadaan barang dan benturan kebijakan keamanan luar negeri (Sriyanto, 2022). Berbagai kondisi khusus di atas membawa pada satu kesimpulan umum bahwa terdapat hubungan kausalitas yang bersifat deterministik antara kualitas penyiapan di hulu oleh PMPP TNI dengan tingkat kepercayaan institusional (*institutional trust*) yang diberikan PBB di hilir. Kualitas penyiapan pasukan menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan institusional karena kesiapan operasional, disiplin, interoperabilitas, dan kemampuan adaptasi kontingen merupakan indikator utama keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian modern. Ketika PMPP TNI berhasil mengimplementasikan input pelatihan berkualitas tinggi berlandaskan kurikulum *United Nations Infantry Battalion Manual* (UNIBAM) dan inisiatif *Action for Peacekeeping* (A4P), memelihara sarana latihan secara optimal, serta meningkatkan kompetensi komunikasi militer, maka output taktis berupa kelulusan inspeksi COE dan kepatuhan disiplin yang tinggi akan tercapai secara konsisten. Output taktis yang unggul ini secara langsung menghasilkan dampak atau impact berupa keberlanjutan pengerahan pasukan tanpa penanguhan, jaminan pengembalian anggaran (*reimbursement*) yang utuh, dan penempatan perwira TNI pada posisi komando strategis di daerah misi (Sriyanto, 2022). Pada akhirnya, rantai dampak positif tersebut akan mentransformasikan kontribusi militer menjadi nilai strategis nasional berupa penguatan diplomasi pertahanan global serta peningkatan proyeksi soft power Indonesia di panggung internasional (Kusuma & Husain, 2025).

Ketidaksiharian antara target kebijakan nasional dengan realitas empiris di lapangan terlihat jelas pada beberapa aspek utama. Di sektor logistik dan alutsista, Indonesia menargetkan pemenuhan standar kelaikan peralatan secara mutlak untuk menghindari pemotongan pengembalian anggaran dari PBB. Namun, realitasnya dicirikan oleh alutsista yang usang, keterlambatan rotasi material, serta ketiadaan unit pengadaan barang mandiri di bawah PMPP TNI yang berujung pada penilaian negatif dalam audit logistik PBB. Begitu pula dalam sistem pasukan siaga cepat, di mana target partisipasi aktif dalam UNPCRS terhambat oleh penurunan kontribusi riil, kegagalan pendaftaran satuan tugas baru, serta keterbatasan cakupan hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015. Pada aspek kapasitas personel, upaya menyiapkan prajurit berkemampuan multidomain berbenturan dengan rendahnya kompetensi bahasa Inggris operasional, keterbatasan instruktur bersertifikasi, dan kerusakan sarana latihan pratugas. Terakhir, kemitraan pertahanan bilateral dengan negara-negara maju seperti Australia, Jepang, dan Ethiopia untuk *combined deployment* terpaksa terhenti akibat regulasi domestik yang kaku, sehingga membatasi transfer teknologi militer dan memaksa Indonesia bergantung pada deployment mandiri yang berbiaya tinggi (Sriyanto, 2022).

Kondisi yang diharapkan dari sistem ini adalah terciptanya postur pertahanan yang adaptif dan kredibel, di mana PMPP TNI mampu melahirkan satuan tugas dengan tingkat

kesiapan multidomain yang prima dan didukung alutsista laik pakai guna menjamin kelulusan inspeksi COE hingga seratus persen. Prajurit yang dikirimkan diharapkan memiliki penguasaan bahasa komunikasi operasional yang sejajar dengan negara-negara kontributor maju, didukung oleh instruktur yang seluruhnya telah tersertifikasi standar PBB (Suparman, 2023). Di tingkat strategis, Indonesia diharapkan mampu mengadopsi mekanisme UNPCRS secara penuh, mewujudkan sistem pengerahan pasukan siaga cepat yang dinamis, serta mengimplementasikan kerja sama combined deployment dengan negara-negara donor tanpa hambatan birokrasi, sehingga mengamankan posisi tawar geopolitik nasional di forum multilateral dan menempatkan perwira-perwira terbaik pada komando strategis PBB (Sriyanto, 2022). Namun, kenyataannya terdapat jurang atau gap masalah yang lebar antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas kapasitas taktis dan regulatif saat ini, yang tercermin dari bagaimana variabel kepercayaan PBB didekonstruksi dan diukur secara objektif. Kepercayaan PBB bukanlah konsep abstrak berasumsi normatif, melainkan akumulasi penilaian kinerja riil yang diverifikasi melalui instrumen evaluasi resmi UN DPO. Kepercayaan tersebut diukur secara empiris melalui frekuensi penugasan dan keberlanjutan pengerahan pasukan tanpa penangguhan akibat catatan kinerja buruk (Campbell & Cunningham, 2025), serta peringkat kesiapan unit taktis Indonesia dalam database UNPCRS yang mencerminkan kecepatan mobilisasi dari fase siaga domestik menuju medan operasi. Selain itu, tingkat kepercayaan ini tercermin dari persentase kesesuaian fisik alutsista dengan standar *Memorandum of Understanding* (MoU) PBB yang diverifikasi melalui inspeksi kelayakan peralatan triwulanan, serta penilaian komprehensif melalui CPAS yang memantau dampak taktis kontingen dalam perlindungan warga sipil dan penanganan konflik lokal. Indikator lainnya mencakup pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan militer Indonesia melalui permintaan spesialisasi tinggi seperti unit Zeni atau *Rapid Deployable Battalion* (RDB) serta penempatan perwira TNI pada posisi komando strategis di daerah misi. Reputasi interoperabilitas yang ditopang oleh penguasaan bahasa komunikasi standar juga menjadi ukuran penting untuk berintegrasi secara mulus dalam operasi gabungan. Terakhir, komitmen terhadap nilai-nilai integritas dibuktikan secara ketat melalui rekam jejak kepatuhan disiplin penuh serta kepatuhan terhadap kebijakan nol toleransi PBB terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual (Wagner et al., 2022).

Dimensi evaluasi taktis dan sistem verifikasi resmi yang digunakan oleh PBB untuk mengukur indikator-indikator kepercayaan tersebut mencakup ranah operasional, logistik, kepemimpinan, dan integritas. Kesiapan operasional dan kepatuhan terhadap aturan pelibatan (*Rule of Engagement*) diverifikasi secara berkala melalui *Operational Effectiveness Inspection* (OEI) serta laporan berkala CPAS. Sementara itu, keandalan aspek logistik alutsista diuji secara ketat melalui Laporan Inspeksi COE Triwulanan serta Laporan Audit Kinerja OIO (Bilmes et al., 2021). Di sisi lain, kapasitas kepemimpinan taktis para perwira dievaluasi langsung oleh *Office of Military Affairs* (OMA) PBB berdasarkan penguasaan bahasa militer khusus dan pengambilan keputusan taktis dalam situasi krisis. Terakhir, integritas dan disiplin kontingen dipantau secara ketat melalui laporan berkala dari Conduct and Discipline Unit (CDU) UN DPO guna memastikan zero-tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Wagner et al., 2022). Pentingnya penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk mendudukkan peran strategis PMPP TNI secara tepat guna dalam arsitektur diplomasi pertahanan negara. PMPP TNI sejatinya merupakan instrumen vital yang bertanggung jawab menerjemahkan kesiapan militer domestik menjadi proyeksi kekuatan lunak (*soft power*) serta instrumen pembangun kepercayaan multilateral di kancah global. Untuk menguji efektivitas kesiapan tersebut secara ilmiah, studi ini mengadopsi pendekatan evaluasi objektif dengan melakukan triangulasi data yang mempertemukan kapasitas riil militer nasional, mulai dari ketersediaan

anggaran, kesiapan alutsista, kompetensi instruktur, hingga penguasaan bahasa taktis, dengan instrumen evaluasi kinerja resmi PBB, termasuk *Comprehensive Planning and Performance Assessment System* (CPAS), audit logistik OIOS, serta indikator efektivitas pelatihan model Kirkpatrick. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak didasarkan pada asumsi normatif melainkan pada pembuktian kesesuaian taktis yang valid. Lebih jauh, hasil penelitian ini diarahkan untuk memberikan kemanfaatan strategis dan praktis yang konkret bagi kepentingan nasional Indonesia. Nilai guna tersebut diwujudkan melalui formulasi rekomendasi untuk mengatasi kebuntuan regulasi pengiriman pasukan siaga cepat melalui reformulasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015, mengamankan keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, meminimalkan risiko pemotongan reimbursement, serta menjamin keselamatan fisik dan moril prajurit Kontingen Garuda melalui jaminan kesiapan operasional yang prima di daerah misi. Melalui penyelarasan ini, penelitian menawarkan solusi kebijakan yang integratif guna menyelaraskan postur pertahanan Indonesia dengan tuntutan tata kelola perdamaian modern PBB.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang merupakan hasil dari proses mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana strategi PMPP TNI dalam meningkatkan kesiapan Kontingen Garuda Indonesia untuk misi perdamaian dunia PBB? Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses meningkatkan kesiapan untuk misi perdamaian PBB? Bagaimana strategi PMPP TNI dalam memperkuat diplomasi pertahanan negara pada misi perdamaian dunia PBB? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis strategi PMPP TNI dalam meningkatkan kesiapan Kontingen penugasan untuk misi perdamaian PBB. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses meningkatkan kesiapan Kontingen untuk misi perdamaian PBB. Menganalisis strategi PMPP TNI terhadap tingkat kepercayaan PBB dalam memperkuat diplomasi pertahanan negara pada misi perdamaian dunia PBB.

Landasan Teori

Teori Diplomasi Pertahanan

Teori Diplomasi Pertahanan (*Defense Diplomacy*) menjelaskan bagaimana instrumen militer dikerahkan dalam kondisi damai untuk mendukung tujuan politik luar negeri dan keamanan multilateral. Formulasi klasik dari Cottey dan Forster (2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan sumber daya militer dan infrastruktur pertahanan (terutama kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata) secara damai dan non-konfrontatif sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Cottey dan Forster mengidentifikasi beberapa pilar aktivitas diplomasi pertahanan, di antaranya adalah kontak bilateral dan multilateral antarpejabat pertahanan, pengiriman atase pertahanan, perjanjian kerja sama pertahanan, pelatihan personel militer asing, serta kontribusi aktif dalam pembangunan kapasitas operasi pemeliharaan perdamaian internasional (*peacekeeping*). Dalam lanskap hubungan internasional modern, diplomasi pertahanan berfungsi sebagai manifestasi utama dari proyeksi kekuatan lunak (*soft power*) suatu negara. Konseptualisasi *soft power* yang digagas oleh Nye (2004) menekankan kemampuan suatu negara untuk memengaruhi perilaku aktor lain melalui daya tarik nilai, budaya, kebijakan politik, dan kredibilitas institusional tanpa menggunakan pemaksaan fisik (*coercion*) atau transaksi material (*carrots and sticks*). Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB (seperti Kontingen Garuda) merupakan bentuk konkret konversi kapabilitas militer (*hard power*) menjadi aset *soft power* yang sangat bernilai (Yuninda et al., 2024). PMPP TNI, sebagai lembaga hulu yang mencetak para penjaga perdamaian, merupakan organ vital dalam implementasi diplomasi pertahanan Indonesia di forum multilateral. Melalui keterlibatan aktif ini, angkatan bersenjata berperan sebagai duta negara yang melakukan pelibatan strategis

(*strategic engagement*) di wilayah konflik guna membangun stabilitas keamanan internasional sekaligus mengamankan kemauan baik (*goodwill*) global.

Teori *Institutional Trust*

Rathbun (2011) membagi kepercayaan dalam kerja sama multilateral ke dalam dua tipologi utama: *generalized trust* (kepercayaan umum) dan *strategic trust* (kepercayaan strategis/kalkulatif). *Generalized trust* merupakan keyakinan moralistik dan disposisional bahwa aktor lain pada dasarnya memiliki iktikad baik dan dapat dipercaya, bahkan ketika informasi mengenai niat mereka sangat terbatas. Sebaliknya, *strategic trust* adalah kepercayaan yang bersifat situasional, transaksional, dan kalkulatif, yang dibangun berdasarkan evaluasi rasional terhadap informasi, rekam jejak, dan kepentingan aktor lain yang saling mengikat (*encapsulated interest*) (Rathbun, 2012). Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi keamanan multilateral, kepercayaan institusional (*institutional trust*) terhadap negara kontributor pasukan (TCC) dibangun melalui mekanisme *strategic trust* yang sangat rigid. PBB menilai kredibilitas suatu negara berdasarkan indikator kinerja obyektif yang meliputi:

1. Konsistensi (*Consistency*). Rekam jejak partisipasi jangka panjang negara kontributor dalam mempertahankan komitmen pengiriman pasukan tanpa melakukan penarikan sepihak dalam situasi kritis (Karlsud, 2019).
2. Keandalan (*Reliability*). Kemampuan unit militer untuk mempertahankan standar kesiapan operasional dan kesiapan material (COE) yang tinggi di medan operasi ekstrem (Haryanto & Supriyadi, 2023).
3. Interoperabilitas (*Interoperability*). Kelancaran koordinasi taktis dan integrasi operasional pasukan dengan kontingen militer dari negara lain serta komponen sipil PBB.
4. Profesionalisme (*Professionalism*). Kompetensi teknis prajurit dalam mengeksekusi mandat misi, penguasaan komunikasi militer (ESMP), serta kecakapan kepemimpinan komandan taktis di lapangan.
5. Kepatuhan (*Compliance*). Ketundukan mutlak terhadap aturan pelibatan (Rules of Engagement/ROE) serta kebijakan zero-tolerance PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi seksual (*Sexual Exploitation and Abuse/SEA*) (United Nations Conduct and Discipline Unit, 2021).
6. Kinerja Misi (*Mission Performance*). Dampak taktis positif yang dihasilkan kontingen dalam menstabilkan daerah operasi, melindungi warga sipil (POC), dan mengamankan misi kemanusiaan (United Nations Department of Peace Operations, 2019)

Konstruksi kepercayaan ini diperkuat dengan mengadopsi konsep *Reputation-Based Trust* dan *Performance Legitimacy*. Legitimasi dan kepercayaan terhadap pasukan perdamaian di daerah misi tidak hanya bergantung pada legitimasi formal-legal mandat Dewan Keamanan PBB (*normative legitimacy*), namun sangat ditentukan oleh efektivitas kinerja nyata mereka di lapangan (*performance legitimacy*). Kontingen yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur, serta komunikasi humanis dengan komunitas lokal (CIMIC) akan memperoleh tingkat penerimaan (*local consent*) dan kepercayaan yang tinggi (Schmelzle & Stollenwerk, 2018). Keberhasilan taktis di tingkat lokal ini terekam oleh instrumen evaluasi PBB (seperti CPAS) dan bertransformasi menjadi reputasi kelembagaan yang kokoh bagi Indonesia di Markas Besar PBB. Untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana kepercayaan kalkulatif ini bekerja di bawah payung organisasi internasional, teori *Principal-Agent* memberikan sudut pandang yang komprehensif mengenai pola delegasi otoritas keamanan. Dalam kerangka ini, Dewan Keamanan PBB bertindak sebagai *Principal* yang mendelegasikan mandat operasional kepada negara kontributor pasukan (TCC) selaku

Agent yang memiliki kapasitas militer spesifik (Hawkins et al., 2006). Tantangan utama dalam relasi ini adalah munculnya risiko ketidakselarasan kepentingan (*interest asymmetry*) dan asimetri informasi, di mana *Principal* kesulitan memantau perilaku *Agent* secara langsung di medan operasi yang terisolasi. Oleh karena itu, *institutional trust* tidak lahir secara organik, melainkan dipaksakan melalui regulasi akuntabilitas yang ketat guna memastikan bahwa implementasi taktis oleh pasukan di lapangan tidak melenceng dari batas-batas mandat legal yang telah digariskan (Nielson & Tierney, 2003).

Konsep Peran Strategis Institusi Pertahanan

Guna menganalisis peran kelembagaan PMPP TNI tanpa terjebak dalam pendekatan manajemen bisnis sekuler, penelitian ini menerapkan *Organizational Role Theory* (Turner 2001; Biddle 1986) dan *Defense Institution Theory*. Dalam sosiologi organisasi militer, peran strategis sebuah institusi pertahanan didefinisikan sebagai jaringan ekspektasi sosial dan tugas formal yang melekat pada posisi organisasi dalam sistem pertahanan negara dan keamanan internasional. Peran strategis ini terus dikonstruksi dan dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara ekspektasi eksternal (*role expectations*) dengan kapasitas internal organisasi dalam memerankan perannya (*role enactment*). Apabila ekspektasi dari lingkungan eksternal (dalam hal ini, standar evaluasi taktis PBB yang dinamis) tidak mampu diimbangi oleh kapasitas internal, maka akan terjadi konflik peran (*role conflict*) atau ambiguitas peran (*role ambiguity*) yang menurunkan efektivitas kelembagaan. PMPP TNI mengemban peran strategis sebagai "mediator dan filter strategis" yang bertugas menyelaraskan potensi militer nasional dengan tuntutan tugas internasional. Teori ini menjelaskan bahwa PMPP TNI harus secara adaptif menerjemahkan mandat abstrak PBB menjadi program kesiapan taktis yang terukur bagi prajurit TNI, sehingga memitigasi terjadinya kesenjangan peran saat pasukan diterjunkan ke daerah misi (Sriyanto, 2022). Dalam mengeksekusi peran mediasi tersebut di tengah dinamika global yang fluktuatif, institusi pertahanan dituntut untuk memiliki fleksibilitas operasional yang dianalisis melalui teori *Strategic Adaptation* (Adaptasi Strategis). Teori ini menekankan bahwa organisasi militer modern tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus memiliki kemampuan inheren untuk mengantisipasi, merespons, dan menyelaraskan struktur internalnya dengan perubahan lanskap ancaman keamanan internasional (Farrell, 2010). Proses adaptasi ini melibatkan rekonfigurasi doktrin, pembaruan metode pelatihan, serta adopsi teknologi baru secara cepat tanpa merusak nilai-nilai dasar organisasi. Kegagalan dalam melakukan adaptasi strategis akan menyebabkan keteringgalan taktis, di mana kurikulum penyiapan pasukan menjadi usang dan tidak relevan dengan kompleksitas medan operasi kontemporer (Avant, 1994).

Konsep Kesiapan Operasional (*Operational Readiness*)

Kesiapan operasional (*operational readiness*) dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian nirmiliter didefinisikan sebagai kemampuan sistematis suatu kontingen untuk melakukan mobilisasi, pengerahan, dan pelaksanaan tugas operasional sesuai dengan mandat PBB secara cepat, tepat, aman, dan berkelanjutan. Mengacu pada model kapabilitas pertahanan (Hagel III & Brown 2005), kesiapan operasional merupakan hasil penggabungan antara sumber daya fisik yang berwujud (*tangible resources*) seperti alutsista, senjata, dan anggaran, dengan sumber daya nir-fisik yang tidak berwujud (*intangible resources*) seperti moral, etika, doktrin, taktik, dan kompetensi intelektual prajurit. Dalam arsitektur *peacekeeping* modern, kesiapan operasional tidak lagi diukur secara konvensional, melainkan mengacu pada parameter ketat yang ditetapkan oleh sistem UNPCRS (*United Nations Peacekeeping Capability Readiness System*). Konsep kesiapan operasional ini membagi postur penyiapan ke dalam tiga dimensi utama:

1. Kesiapan Prosedural (*Procedural Readiness*): Tingkat kepatuhan materi pelatihan praturgas terhadap kurikulum standar PBB, khususnya dokumen *Core Pre-Deployment Training Materials* (CPTM) dan *United Nations Infantry Battalion Manual* (UNIBAM)
2. Kesiapan Personel (*Personnel Readiness*): Kualifikasi fisik, mental, disiplin, penguasaan hukum humaniter internasional, serta kompetensi komunikasi bahasa asing taktis (ESMP) prajurit.
3. Kesiapan Material (*Material Readiness*): Kelaikan fisik alutsista, rantis, senjata, dan peralatan pendukung kehidupan (*Contingent Owned Equipment/COE*) yang harus memenuhi spesifikasi *Statement of Unit Requirements* (SUR) yang ditetapkan PBB.

Konseptualisasi ini membantu peneliti menganalisis seberapa efektif PMPP TNI mengelola integrasi ketiga dimensi tersebut di tengah keterbatasan anggaran pertahanan nasional. Untuk memahami bagaimana integrasi ketiga dimensi tersebut dipertahankan dalam jangka panjang, teori *Dynamic Capabilities* (Kapabilitas Dinamis) menyediakan kerangka analisis yang relevan. Dalam sosiologi organisasi dan manajemen strategis, kapabilitas dinamis didefinisikan sebagai kemampuan institusi untuk membangun, mengintegrasikan, dan merekonfigurasi kompetensi internal dan eksternal secara cepat demi menghadapi lingkungan yang berubah secara akseleratif (Teece et al., 1997). Dalam konteks PMPP TNI, kesiapan operasional tidak boleh dipandang sebagai kondisi statis yang tercapai setelah pelatihan praturgas selesai, melainkan sebuah proses dinamis. Institusi harus terus-menerus memindai (*sensing*), menangkap (*seizing*), dan mentransformasi (*transforming*) taktik serta prosedur operasionalnya agar selalu sinkron dengan eskalasi ancaman di wilayah misi PBB yang kerap berubah secara tak terduga (Eisenhardt & Martin, 2000). Dimensi kesiapan material (*material readiness*) yang melibatkan pengelolaan COE dan kepatuhan terhadap SUR secara teoretis dapat dibedah menggunakan *Military Logistics Theory* (Teori Logistik Militer). Logistik dalam operasi militer selain perang bukan sekadar urusan pemindahan barang, melainkan elemen penentu yang membatasi atau memperluas jangkauan operasional pasukan (Eccles, 1959). Kesiapan logistik yang efektif bertumpu pada prinsip fleksibilitas, ketepatan waktu, dan efisiensi rantai pasok. Ketika sebuah kontingen militer beroperasi di medan ekstrem yang terisolasi, kegagalan logistik—seperti kerusakan material pendukung atau keterlambatan suku cadang—secara langsung akan melumpuhkan mobilitas taktis prajurit dan menurunkan kredibilitas operasional di mata penilai PBB (Thorpe, 1917).

Konsep Strategi Pertahanan Negara

Konsep strategi pertahanan negara nirmiliter dalam kajian ini dibangun secara komprehensif dengan merujuk pada dialektika pemikiran strategi pertahanan klasik hingga kontemporer. Clausewitz (1976) meletakkan premis akademis bahwa pengerahan kekuatan militer pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari politik dengan sarana lain, sebuah pandangan yang mengonfirmasi bahwa pengiriman pasukan perdamaian merupakan instrumen politik luar negeri yang sah untuk mengamankan kepentingan nasional jangka panjang. Di sisi lain, pemikiran Liddell (1967) melalui pendekatan tidak langsung (*indirect approach*) memberikan landasan bahwa pencapaian tujuan strategis pertahanan sering kali lebih efektif apabila negara meminimalkan benturan militer konvensional langsung dan sebaliknya memaksimalkan pengaruh psikologis-politik melalui instrumen diplomasi. Penjembatanan antara kapabilitas militer domestik dengan tujuan politik global ini diperjelas oleh Gray (1999), yang mendefinisikan strategi sebagai arsitektur dinamis untuk menyelaraskan sasaran (*ends*), metode (*ways*), dan sumber daya (*means*). Spektrum ini diperluas oleh Buzan (1991) melalui gagasan keamanan multidimensi yang melampaui batas militer tradisional, sehingga menuntut institusi militer memiliki tingkat adaptabilitas nirmiliter

yang tinggi dalam merespons dinamika ancaman politik, sosial, dan kemanusiaan. Pemikiran ini bersambut dengan pandangan Till (2004) mengenai proyeksi kekuatan ekspedisioner nirmiliter guna mengamankan ketertiban internasional berbasis aturan, serta pemikiran Schelling (1960) tentang pentingnya komitmen dan sinyal bermutu tinggi (*costly signaling*) dalam menegaskan kredibilitas kapabilitas suatu negara di mata komunitas global.

Berdasarkan berbagai landasan pemikiran strategi pertahanan tersebut, ditarik kesimpulan komprehensif bahwa dalam doktrin pertahanan negara Indonesia, partisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia merupakan wujud nyata dari strategi pertahanan proaktif atau diplomasi pertahanan aktif. Penggunaan istilah pertahanan proaktif ini sangat krusial untuk membedakannya secara tegas dari doktrin pertahanan aktif (*active defense*) taktis-defensif milik negara-negara tertentu yang cenderung militeristik. Melalui pemosisian ini, pengerahan Kontingen Garuda oleh PMPP TNI bertindak sebagai bentuk *costly signaling* yang kredibel, di mana pengorbanan sumber daya pertahanan nasional dikonversi secara strategis untuk mereduksi ketidakstabilan di daerah misi sekaligus memproyeksikan daya tangkal nirmiliter Indonesia (Widodo & Pedrasan, 2022). Dengan demikian, keikutsertaan dalam operasi multilateral bukan sekadar kontribusi pasif terhadap keamanan bersama, melainkan jembatan strategis yang menghubungkan postur pertahanan domestik dengan peningkatan posisi tawar geopolitik Indonesia di tatanan global.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesiapan Kontingen dalam misi perdamaian PBB dipengaruhi oleh profesionalisme personel, kualitas pelatihan, dukungan logistik, pengembangan SDM, serta kemampuan diplomasi pertahanan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa PMPP TNI memiliki peran strategis dalam menyiapkan pasukan perdamaian yang profesional dan berstandar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas pelatihan, penguatan kapasitas personel, serta partisipasi peacekeeper perempuan dinilai mampu meningkatkan kepercayaan internasional dan memperkuat citra Indonesia di lingkungan PBB. Dengan demikian, strategi PMPP TNI dalam meningkatkan kesiapan Kontingen menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan misi perdamaian dunia sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Berikut penelitian terdahulu pada penelitian ini: Sriyanto (2022), Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini menyoroiti kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia dalam misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Peneliti menekankan pentingnya kesiapan multidimensional dalam menghadapi dinamika konflik yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga kompleks dan asimetris. Temuan utamanya adalah bahwa pasukan Garuda memiliki semangat dan dedikasi tinggi, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan logistik, kesiapsiagaan peralatan, serta adaptasi terhadap lingkungan operasi yang berisiko tinggi. Sriyanto menyarankan penerapan sistem United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS) secara menyeluruh, untuk menjamin kesiapan personel, sarana prasarana, dan sistem pendukung lain secara terpadu. Hal ini menjadi relevan dengan tugas PMPP TNI dalam menyiapkan satuan tugas yang siap operasional, profesional, dan berstandar global, sebagai bentuk diplomasi pertahanan aktif Indonesia melalui penguatan reputasi militernya di mata dunia.

Penelitian oleh Pasaroan, Hadisancoko dan Santoso (2023) Strategi penyiapan pasukan siaga operasi (*standby force*) tentara nasional indonesia dalam tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Penelitian ini menyoroiti hubungan antara kesiapan pasukan dan tingkat kepercayaan lembaga internasional terhadap negara kontributor. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelatihan berdampak positif terhadap institutional trust. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada posisi PMPP TNI sebagai lembaga pelatihan

utama yang menentukan kesiapan kontingen Indonesia. Yuninda, Yusgiantoro, Widodo & Pedrason (2024) – Diplomasi Pertahanan dan Kontingen Garuda Penelitian ini mengangkat relasi antara profesionalisme militer dan diplomasi pertahanan dalam konteks pengiriman Kontingen Garuda. TNI dinilai tidak hanya menjadi alat pertahanan nasional, tetapi juga alat diplomasi luar negeri yang efektif dalam memperkuat citra Indonesia di fora internasional. Penelitian ini menekankan bahwa PMPP TNI memiliki peran utama dalam membangun profesionalisme pasukan, baik dari segi pelatihan, kemampuan komunikasi, adaptasi budaya, hingga integritas moral. Keterlibatan TNI dalam UNPKO meningkatkan “trust capital” Indonesia di PBB. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa sinergi antara militer, kementerian luar negeri, dan sektor industri pertahanan masih belum optimal dalam mendukung penguatan diplomasi pertahanan. Maka PMPP TNI perlu menjadi pusat gravitasi dalam pengintegrasian diplomasi dan operasionalisasi pasukan perdamaian.

Murwanto (2019) Pengembangan Karir Perwira TNI dalam Misi Perdamaian PBB. Penelitian ini Murwanto mengevaluasi minimnya representasi perwira menengah dan tinggi TNI dalam jabatan strategis di struktur misi PBB. Masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya sinkronisasi antara sistem pembinaan karir internal TNI dengan kebutuhan jabatan di misi perdamaian PBB. PMPP TNI dianggap perlu mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berstandar PBB, penguasaan bahasa asing, serta pemahaman geopolitik global. Penelitian ini sangat relevan karena menunjuk pada peran PMPP dalam meningkatkan kapasitas personel untuk menduduki posisi penting seperti *Force Commander*, *Chief of Staff*, atau *Military Observer Team Leader*, yang berkontribusi langsung terhadap reputasi dan kepercayaan PBB terhadap profesionalisme TNI. Astried, Sumertha & Saragih (2021) tentang Partisipasi *Female Peacekeeper Indonesia* dalam UNIFIL. Penelitian ini menyoroti peran Wanita TNI (Wan-TNI) dalam operasi UNIFIL (Lebanon) sebagai bagian dari kontingen Garuda. Peneliti menemukan bahwa peran peacekeeper perempuan masih sangat terbatas, baik dari jumlah maupun jabatan. Padahal, menurut dokumen PBB, keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian sangat penting untuk membangun hubungan dengan komunitas lokal, mengurangi potensi kekerasan seksual, dan memperkuat dimensi gender dalam operasi PBB. Astried et al. (2021) menyarankan perlunya kebijakan afirmatif, pelatihan khusus, dan perluasan rekrutmen Wan-TNI untuk *peacekeeping*. Peran PMPP TNI dalam memfasilitasi pelatihan dan mendorong partisipasi perempuan menjadi penting dalam menunjang diplomasi pertahanan yang berbasis nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan gender, yang pada akhirnya memperkuat posisi Indonesia di mata komunitas internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi untuk memahami, membedah, dan menginterpretasikan secara mendalam fenomena organisasional militer yang kompleks, yaitu peran, kebijakan, dan pilihan strategi yang diimplementasikan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis statistik atau mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif, melainkan untuk menggali makna, mengeksplorasi proses penyiapan pasukan, serta menafsirkan pengalaman empiris dari para aktor kunci dan pengambil kebijakan di lingkungan PMPP TNI. Untuk memperbarui landasan metodologis sesuai dengan perkembangan teori penelitian sosial kontemporer, rujukan utama metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Creswell & Creswell (2018). Menegaskan bahwa metode kualitatif merupakan rumpun penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Karakteristik utama dari metode ini adalah pengumpulan data langsung pada latar alamiah, di mana peneliti

bertindak sebagai instrumen kunci, melakukan analisis data secara induktif untuk membangun pola - pola atau tema, serta menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi naratif yang kaya, holistik, dan komprehensif. Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Studi Kasus. Penggunaan desain studi kasus didasarkan pada pandangan pakar metodologi kontemporer Robert K. Yin (2018). Yin menyatakan bahwa studi kasus adalah penyelidikan empiris yang mendalam untuk menyelidiki fenomena kontemporer secara terperinci di dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan jelas. Lokus kasus yang spesifik dalam penelitian ini adalah strategi kelembagaan PMPP TNI dalam meningkatkan indeks kesiapan operasional Kontingen Indonesia. Melalui desain studi kasus, peneliti dapat melakukan investigasi secara mendalam terhadap sistem pelatihan pra - penugasan, rantai pasok manajemen logistik alutsista, serta implementasi doktrin diplomasi pertahanan multilateral. Pendekatan analisis studi kasus ini dioperasionalkan dengan memadukan pisau analisis teoretis yang tajam untuk mengurai dimensi *Ends* (tujuan akhir diplomasi pertahanan), *Ways* (metode pelatihan dan penyiapan), dan *Means* (sumber daya manusia dan materiil yang dikerahkan).

Penelitian ini dilaksanakan di Markas PMPP TNI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai pusat utama pelatihan dan pembinaan pasukan perdamaian Indonesia. Selain itu, wawancara pendukung juga dilakukan di Markas Besar TNI (Mabes TNI), Kementerian Pertahanan, dan Markas Kontingen Garuda (KONGA) yang baru kembali dari misi luar negeri, seperti Lebanon atau Kongo, guna memperoleh data kontekstual mengenai hasil pembinaan dan pelatihan yang dilakukan PMPP TNI. Penelitian ini dilaksanakan selama \pm 8 bulan, dimulai dari bulan Juni 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Subjek penelitian dalam konteks kualitatif bertindak sebagai informan kunci (*key informants*) yang memiliki otoritas, kompetensi, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung secara aktif dalam proses pembinaan, pelatihan, dan perumusan strategi kesiapan pasukan. Menurut Idrus (2009), subjek penelitian merupakan elemen benda, individu, maupun organisme yang menjadi sumber informasi utama untuk memperoleh data penelitian. Objek penelitian merupakan substansi inti fenomena yang diselidiki, dianalisis, dan dipecahkan dalam studi kasus ini. Secara rinci, objek penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga pilar pembahasa:

1. Mekanisme Strategi PMPP TNI dalam Meningkatkan Kesiapan Kontingen Indonesia. Menyelidiki rancang bangun diklat pra - penugasan berbasis sistem UNPCRS, manajemen seleksi personel, pembekalan kecakapan bahasa dan kultural, serta standardisasi pemenuhan materiil alutsista sesuai dengan spesifikasi
2. Identifikasi Tantangan Internal dan Eksternal dalam Proses Peningkatan Kesiapan Pasukan. Membedah hambatan internal yang meliputi keterbatasan infrastruktur diklat, sinkronisasi kurikulum dengan mandat dinamis PBB serta hambatan eksternal yang mencakup volatilitas geopolitik global di wilayah misi, asimetrisitas konflik, dan kompleksitas sosiokultural di negara penerima misi.
3. Pengaruh Strategi Kesiapan Pasukan PMPP TNI terhadap Penguatan Diplomasi Pertahanan Negara. Menganalisis kesiapan pasukan dalam trust internasional dari PBB menjadi instrumen penguat diplomasi pertahanan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah rangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Creswell, 2014). Langkah-langkah ini meliputi pembatasan penelitian, mengumpulkan informasi dengan cara observasi, wawancara interaktif, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion, deskripsi tertulis dari partisipan, dan materi-materi visual (Chand, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Menurut Nasution (2007) Teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Observasi. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung realitas perilaku organisasi dan aktivitas fisik yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi semi - partisipatif di lingkungan Markas PMPP TNI Sentul. Aspek - aspek yang diamati secara cermat meliputi proses eksekusi latihan taktis pra - penugasan, kualitas dan ketersediaan sarana - prasarana instruksional pelatihan, proses simulasi taktis operasi perdamaian, kondisi materiil alutsista yang disiapkan, serta pola interaksi instruktur dengan para peserta diklat. Seluruh hasil pengamatan dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan sebagai data pelengkap wawancara.
2. Wawancara mendalam terhadap informan kunci (*key informants*) seperti Wawancara dilakukan terhadap para informan kunci yang telah ditetapkan dalam subjek penelitian. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi - terstruktur. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan pokok yang diturunkan langsung dari tiga rumusan masalah. Namun dalam pelaksanaannya, alur pertanyaan bersifat fleksibel dan adaptif, memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan, mengejar informasi baru yang muncul, tanpa keluar dari koridor substansi objek penelitian. Wawancara direkam menggunakan alat perekam digital atas persetujuan informan, kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip tertulis kata demi kata untuk keperluan analisis data.
3. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Buku pedoman pelatihan PBB, Laporan evaluasi misi dari PBB dan Mabes TNI, Data statistik pengiriman pasukan dan laporan tahunan PMPP TNI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran PMPP TNI: Aktor Strategis Adaptif dan Instrumen Diplomasi Pertahanan

Hasil temuan menunjukkan bahwa peran PMPP TNI jauh melampaui sekadar lembaga pelatihan teknis. Lembaga ini berfungsi sebagai aktor strategis yang mengimplementasikan kebijakan pertahanan negara di ranah multilateral. Mengacu pada Teori Peran Strategis dari Mintzberg (1994), strategi didefinisikan sebagai pola keputusan yang mencerminkan penyesuaian organisasi terhadap lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Temuan penelitian menunjukkan PMPP TNI secara sempurna menjalankan peran ini. PMPP TNI tidak hanya mengadopsi standar PBB (CPTM/UNPCRS) secara pasif, tetapi secara aktif menerjemahkan dan mengadaptasi standar tersebut ke dalam konteks kemampuan internal (personel dan sumber daya TNI). Lebih penting lagi, informasi dari pimpinan PMPP menunjukkan adanya *feedback loop* yang berfungsi, di mana PMPP menggunakan evaluasi kinerja dari DPO PBB untuk mereformasi kurikulum (contoh: modul IED MINUSCA). Ini adalah bukti nyata dari sebuah organisasi strategis yang adaptif, menyesuaikan pola keputusannya (kurikulum) berdasarkan umpan balik dari lingkungan eksternal (PBB) untuk mencapai tujuan jangka panjang (peningkatan kepercayaan PBB).

Hasil wawancara dengan pejabat mabes/Kemenhan yang menyatakan bahwa reputasi lulusan PMPP adalah *political capital* yang digunakan (*leverage*) dalam diplomasi, secara langsung mengkonfirmasi relevansi eori Diplomasi Pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Teori ini menyatakan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan sumber daya militer secara damai untuk membangun kepercayaan dan mendukung tujuan politik luar negeri. Dalam konteks ini, PMPP TNI adalah instrumen diplomatik. Pelatihan dan pengiriman Kontingen Garuda (sebagai output PMPP) bukanlah tujuan akhir. Ia adalah sarana (*Ways*) untuk mencapai tujuan politik luar negeri (*Ends*) yang lebih besar, seperti memperkuat posisi tawar Indonesia di PBB dan forum multilateral lainnya. *Bottleneck* koordinasi anggaran menunjukkan adanya

friksi klasik dalam implementasi diplomasi pertahanan, dimana kebutuhan operasional PMPP yang bersifat *agile* harus bersaing dengan siklus birokrasi anggaran Kemenhan/Mabes TNI yang lebih.

Manajemen Kesiapan Operasional: Mengelola Kesenjangan antara Standar Ideal PBB dan Realitas Sumber Daya

Temuan penelitian mengidentifikasi serangkaian tantangan internal (anggaran, SDM, logistik) dan eksternal (kompleksitas misi). Pembahasan ini fokus pada bagaimana PMPP TNI mengelola tantangan tersebut dalam kerangka Teori Manajemen Kesiapan Operasional. Teori ini, sebagaimana diartikan oleh Asmoro et al. (2024), menekankan pada sistematisasi persiapan personel *dan* materiil sesuai standar internasional untuk memastikan respons yang cepat dan tepat. Temuan penelitian menunjukkan adanya *asimetri* dalam manajemen kesiapan PMPP TNI. Di satu sisi, kesiapan personel (mental, disiplin, dan terutama *soft skills* adaptasi budaya) berada pada level yang sangat tinggi dan menjadi keunggulan. Di sisi lain, kesiapan materiil (khususnya realisme alutsista dan fasilitas latihan) memiliki *gap* yang diakui oleh Instruktur dan alumni misi. Hal ini memunculkan pertanyaan analitis yang krusial: *Bagaimana bisa kontingen (KONGA) yang latihannya kurang realistis secara materiil justru tampil sangat profesional dan sangat dipercaya di lapangan?* Jawabannya terletak pada keunggulan kompetitif asimetris Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks *peacekeeping* multilateral modern, kesiapan operasional yang dinilai oleh PBB memiliki bobot yang lebih berat pada faktor manusia (*human factor*) daripada faktor teknologi (*platform*). Profesionalisme KONGA di mata PBB tidak hanya diukur dari kecanggihan alutsista (di mana kita mungkin memiliki *gap*), tetapi dari *soft skill*, *adaptabilitas*, dan *disiplin* (di mana PMPP terbukti *excellent*). Dengan kata lain, keunggulan Indonesia bukanlah pada teknologi, melainkan pada manusia-nya. Kemampuan improvisasi yang disebut oleh instruktur dan kemampuan adaptasi serta pendekatan humanis (Binter) yang dilaporkan alumni misi adalah kekuatan inti yang ditanamkan PMPP. Kekuatan ini secara efektif memitigasi risiko operasional yang timbul dari *gap* anggaran dan logistik. Namun, mitigasi ini memiliki batas dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa PMPP belum sepenuhnya berhasil memitigasi tantangan non-taktis abu-abu (birokrasi PBB, stres psikologis, ambiguitas ROE). Ini menunjukkan bahwa PMPP perlu menggeser fokus realismenya, tidak hanya pada *hard skill*, tetapi juga pada skenario *grey-area* non-taktis.

Kepercayaan PBB sebagai *Political Capital*: Analisis Reputasi dan Dualitas Pengaruh Indonesia

Temuan penelitian memberikan bukti kuat mengenai pengaruh PMPP terhadap kepercayaan PBB. Pembahasan ini menganalisis kepercayaan yang menggunakan Teori Reputasi Internasional dan Teori Kepercayaan Multilateral. Teori Reputasi (Jeffkins, 2003) menyatakan bahwa citra (reputasi) militer dibangun dari konsistensi tindakan jangka panjang. Temuan ini adalah bukti dari tindakan konsisten tersebut dimana lulusan PMPP (KONGA) secara konsisten menunjukkan disiplin, profesionalisme, dan pendekatan humanis. Mekanisme *feedback loop* DPO adalah cara PMPP secara kelembagaan mengelola konsistensi reputasi ini. Sementara itu, Teori Kepercayaan Multilateral (Rathbun, 2009) menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan bahwa pihak lain dapat dipercaya, yang dibangun melalui bukti kredibilitas. Temuan tentang pemberian tugas di sektor paling kritis oleh komandan misi PBB adalah bukti kredibilitas operasional tersebut. Ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi di lapangan, yang jauh lebih kuat daripada sekadar pujian lisan. Analisis mendalam terhadap temuan tentang reputasi kontingen dan jabatan strategis mengungkapkan adanya dualitas atau dua level kepercayaan yang berbeda.

Pembahasan

Kontribusi PMPP TNI dalam Memperkaya Teori Strategi Pertahanan Nirmiliter Memperkaya Teori Strategi Pertahanan Negara dan Diplomasi Pertahanan

Temuan penelitian secara tegas mendukung pandangan bahwa partisipasi dalam peacekeeping melalui PMPP TNI adalah pilar penting dari strategi pertahanan Indonesia. Namun, tesis ini memperkaya teori ini dengan menunjukkan dimensi *soft power* yang sangat terukur. Teori strategi pertahanan dan diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004) seringkali berfokus pada pelatihan teknis militer atau latihan bersama. Tesis ini membuktikan bahwa PMPP TNI, melalui fokusnya pada *soft skills* (kompetensi budaya dan pendekatan teritorial), telah menciptakan mekanisme diplomatik yang jauh lebih efektif di lapangan daripada sekadar kehadiran militer. Pendekatan Binter yang dilatihkan PMPP berhasil menanamkan kepercayaan di masyarakat lokal, yang kemudian memberikan keunggulan operasional (akses informasi intelijen). Ini menegaskan bahwa diplomasi pertahanan dalam konteks PMPP TNI adalah sebuah proses yang terstruktur dan terlembaga, yang mengkonversi *human factor* TNI menjadi aset *soft power* yang strategis.

Kritik Terhadap Teori Manajemen Kesiapan Operasional

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III (1973) mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan SOP. Dalam menganalisis Manajemen Kesiapan Operasional PMPP TNI, tesis ini menemukan adanya anomali signifikan dalam variabel *resources* (sumber daya). Meskipun temuan mengkonfirmasi adanya gap sumber daya materiil (logistik/anggaran), yang secara teoretis seharusnya menghambat implementasi, kinerja KONGA tetap superior. Hal ini menunjukkan bahwa teori manajemen kesiapan operasional dalam konteks *peacekeeping* multilateral, perlu mempertimbangkan variabel moderasi yang kuat, yaitu kualitas sumber daya manusia (Q-SDM) atau *human factor*. Superioritas Q-SDM yang dilatih PMPP TNI berfungsi sebagai penyeimbang yang mampu mengkompensasi kekurangan materiil. Dengan demikian, keberhasilan implementasi PMPP terjadi karena PMPP berhasil memaksimalkan *communication* (internal PMPP/instruktur), *structure* (proses pelatihan), dan SOP (adopsi UNPCRS) untuk melampaui hambatan *resources*.

Signifikansi Teori Reputasi Internasional dalam Keamanan Multilateral

Teori reputasi internasional (Jeffkins, 2003) menekankan bahwa citra militer suatu negara dibangun dari konsistensi dan kualitas kontribusinya. Reputasi positif KONGA di lapangan, yang secara konsisten diakui oleh staf PBB dan kontingen negara lain, adalah bukti keberhasilan manajemen reputasi PMPP. Pembahasan ini menegaskan bahwa dalam kerja sama multilateral, reputasi berfungsi sebagai mata uang strategis. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang yang bukan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, reputasi yang dibangun PMPP memungkinkan Indonesia berpartisipasi dan bahkan memimpin (melalui tugas kritis) di sektor-sektor yang mungkin didominasi oleh negara-negara *hard power*. Reputasi ini memberikan kredibilitas (level 1) yang sangat penting untuk mencapai kepercayaan multilateral, bahkan jika pengaruh strategis (level 2) masih terbatas.

Memitigasi Kesenjangan Kapabilitas dan Reputasi Menjawab Kesenjangan Logistik dan Kapabilitas

Penelitian Sriyanto (2022) menyoroti masih lemahnya kapabilitas logistik dan materiil pasukan Indonesia, serta perlunya penerapan UNPCRS secara menyeluruh. Temuan tesis ini memberikan nuansa baru: PMPP TNI telah mengimplementasikan UNPCRS sebagai standar kurikulum, namun hambatan logistik yang disorot Sriyanto masih ada. Dialognya adalah PMPP

telah mencapai *procedural readiness* dan *personnel readiness* yang tinggi. Namun, *material readiness* masih tertinggal karena adanya *bottleneck* anggaran di level Kemenhan/Mabes TNI. Tesis ini menyimpulkan bahwa PMPP telah menjalankan tugas mitigasi operasionalnya, tetapi penyelesaian isu kapabilitas materiil dan logistik kini menjadi masalah tata kelola kebijakan pertahanan nasional yang lebih besar, bukan hanya tanggung jawab PMPP.

Penguatan Dimensi Gender dan Inklusivitas

Astried et al (2021) menyoroti minimnya representasi *female peacekeeper* (Wan-TNI) dan perlunya kebijakan gender yang lebih kuat. Pembahasan ini sangat relevan karena tuntutan PBB terhadap kesetaraan gender telah menjadi indikator formal dalam kepercayaan PBB dan UNPCRS. Saat ini, PBB menargetkan peningkatan representasi perwira staf perempuan dan pengamat militer hingga 25% pada tahun 2028. Keterbatasan peran Wan-TNI, sebagaimana telah dilaporkan oleh Astried et al., (2021) menciptakan risiko reputasi. PMPP TNI harus mengintegrasikan isu ini sebagai bagian dari strategi pertahanan aktif. Keterlibatan perempuan dalam misi (terutama penanganan SGBV dan engagement dengan komunitas lokal) merupakan elemen krusial dalam misi *peacebuilding* modern, sehingga peningkatan partisipasi Wan-TNI adalah syarat untuk memenuhi standar kepercayaan PBB yang bersifat multidimensi.

Mendukung Konversi Reputasi menjadi Pengaruh Strategis

Temuan tesis ini secara langsung mendukung dan memperluas penelitian Murwanto (2019) yang menyoroti minimnya perwira menengah/tinggi (Pamen/Pati) Indonesia dalam jabatan strategis PBB. Murwanto (2019) menyarankan sinkronisasi sistem pengembangan karier. Tesis ini memberikan validasi empiris mengapa gap itu terjadi: PMPP TNI unggul dalam penyiapan operasional (Level 1), tetapi tidak bertanggung jawab penuh atas pengembangan karier perwira tingkat strategis (Level 2). Pembahasan ini menegaskan bahwa untuk mengisi strategic gap ini, dibutuhkan investasi yang fokus di luar PMPP, seperti program khusus di Sesko TNI yang melatih kepemimpinan strategis, kemampuan negosiasi multilateral, dan penguasaan bahasa asing tingkat komandan, sehingga perwira TNI mampu bersaing untuk posisi kunci di Markas Besar PBB.

Kontribusi Akademik (*Novelty*) Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap disiplin ilmu strategi pertahanan, studi perdamaian, dan hubungan internasional, terutama dalam konteks kontribusi TCC dari negara berkembang. Kontribusi akademik utama (*novelty*) penelitian ini meliputi:

1. Formulasi Model Keunggulan Kompetitif Asimetris Indonesia (MKCAI). Tesis ini menawarkan model analitis yang menjelaskan secara terstruktur bagaimana Indonesia mengkonversi soft power (disiplin, etika, kompetensi budaya) menjadi kekuatan inti strategis yang memitigasi kekurangan materiil, sehingga mencapai efektivitas operasional yang tinggi. Model ini menyediakan kerangka kerja baru bagi studi pertahanan di negara berkembang.
2. Identifikasi dan Analisis Dualitas Kepercayaan PBB. Kontribusi utama adalah membedah kepercayaan PBB menjadi dua level, yaitu level 1 untuk operasional, dan level 2 untuk strategis/kelembagaan dan menganalisis diskoneksi antara keduanya. Analisis ini menjelaskan mengapa Indonesia, meskipun memiliki reputasi lapangan yang sangat baik, belum mampu sepenuhnya mengubah modal reputasi ini menjadi pengaruh strategis di Markas Besar PBB.
3. Perluasan Definisi Tantangan Misi (*Grey Area*). Artikel ini menyoroti tantangan non-taktis dan psikososial (birokrasi PBB, stres, ambiguitas ROE) sebagai fokus strategis baru dalam

penyiapan pasukan perdamaian. Ini memperluas lingkup kajian ilmiah yang selama ini cenderung fokus pada ancaman fisik (taktis) atau konflik konvensional.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis Berkelanjutan

Berdasarkan Sintesis Interpretatif (MKCAI) dan analisis dualitas kepercayaan PBB, rekomendasi kebijakan dirumuskan secara preskriptif, ditujukan untuk memperkuat peran PMPP TNI dan mengatasi *strategic gap* di level nasional.

1. Rekomendasi untuk PMPP TNI. Rekomendasi yang diberikan untuk PMPP TNI berfokus kepada kesiapan level 1 dan adaptasi kurikulum. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya:
 - a. Reformasi Kurikulum *Grey Area*. PMPP harus meresmikan modul pelatihan untuk meniru realitas non-taktis yang dihadapi alumni misi. Ini mencakup simulasi interaksi birokrasi sipil PBB, pelatihan ketahanan mental dan psikologis (*Stress Inoculation Training*) untuk penugasan jangka panjang, dan studi kasus Ambiguitas ROE untuk memperkuat *Ethical Decision Making* (EDM) di tingkat perwira taktis.
 - b. Mendorong Partisipasi Gender Inklusif. PMPP perlu menetapkan target internal yang ambisius untuk peningkatan rekrutmen dan penyiapan *Female Peacekeepers* (Wan-TNI) di semua posisi. Ini harus sejalan dengan target PBB untuk mencapai 25% Perwira Staf dan Pengamat Militer perempuan pada tahun 2028, memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam standar kualitas modern PBB.
 - c. Memperkuat Feedback Loop Materiil. Meskipun isu anggaran berada di luar kendali penuh PMPP, PMPP harus mengembangkan mekanisme penilaian material pasca misi yang terperinci. Hasil penilaian ini harus digunakan untuk mendesak Mabes TNI dan Kemenhan agar memprioritaskan modernisasi alutsista latihan yang 100% *mirroring* spesifikasi PBB.
2. Rekomendasi untuk Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Rekomendasi yang diberikan untuk Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan berfokus kepada pengaruh pada level 2. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya:
 - a. Membentuk Program Kaderisasi Kepemimpinan PBB (SLP). Untuk mengatasi gap jabatan strategis (Murwanto, 2019), Mabes TNI harus menciptakan *Senior Leadership Program* (SLP) khusus yang difokuskan pada perwira menengah dan tinggi (Pamen/Pati) yang dipersiapkan untuk menduduki posisi *Force Commander* atau *Chief of Staff*. Program ini harus mencakup studi geopolitik global, pelatihan manajerial PBB, dan penguasaan bahasa asing pada level C1/C2.
 - b. Mekanisme Anggaran Agile Khusus PMPP. Kemenhan perlu mengusulkan penetapan anggaran khusus (*ring-fenced budget*) untuk PMPP TNI yang memisahkan belanja modal (modernisasi fasilitas dan alutsista pelatihan) dari anggaran pertahanan rutin. Fleksibilitas anggaran ini penting agar PMPP dapat merespons tuntutan standar UNPCRS yang berubah cepat tanpa terhambat siklus birokrasi tahunan.
 - c. Diplomasi Promosi Staf Agresif. Kementerian Luar Negeri dan Kemenhan harus menggunakan keberhasilan operasional PMPP sebagai *political capital* untuk secara agresif mempromosikan kandidat perwira tinggi Indonesia ke posisi kunci di *Department of Peace Operations* (DPO) di New York dan markas misi di lapangan. Keberhasilan ini akan secara langsung mengkonversi reputasi taktis menjadi pengaruh strategis bagi Indonesia dalam tatanan keamanan global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. PMPP TNI memiliki peran strategis sebagai pusat penyiapan kontingen Indonesia melalui proses standardisasi kurikulum CPTM/UNPCRS, pembentukan soft skills seperti kompetensi budaya, komunikasi, dan etika internasional, serta koordinasi antarlembaga yang efektif. Peran ini menjadikan PMPP TNI sebagai aktor utama yang memastikan kesiapan operasional kontingen Garuda sesuai standar PBB, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan multilateral.
2. PMPP TNI menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal meliputi keterbatasan anggaran, kesenjangan kemampuan awal personel dalam bahasa asing dan teknologi, serta ketidaksesuaian sebagian fasilitas dan peralatan latihan dengan kondisi lapangan. Sementara tantangan eksternal mencakup dinamika ancaman misi, pola konflik asimetris, birokrasi PBB, tekanan psikologis, serta kompleksitas penerapan *Rules of Engagement* (ROE). Kondisi ini menuntut PMPP TNI meningkatkan agilitas kurikulum dan dukungan sumber daya agar penyiapan pasukan semakin relevan dan responsif.
3. Peran PMPP TNI berpengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan PBB melalui evaluasi kinerja yang baik, peningkatan permintaan penugasan, dan reputasi positif kontingen Indonesia di lapangan, baik di mata PBB, kontingen negara lain, maupun masyarakat lokal. Meskipun demikian, reputasi operasional yang kuat belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan jumlah perwira Indonesia pada jabatan strategis di struktur misi PBB, sehingga masih diperlukan strategi penguatan kapabilitas SDM dan diplomasi untuk meningkatkan representasi Indonesia dalam kepemimpinan misi.

Saran

1. Saran Teoretis. Secara teoretis, penelitian ini mendorong pengembangan kajian lebih lanjut terkait model keunggulan kompetitif Indonesia dalam peacekeeping, terutama dalam memadukan soft power, diplomasi pertahanan, serta kompetensi budaya yang dimiliki Kontingen Garuda. Selain itu, diperlukan penelitian mendalam mengenai mekanisme pembentukan kepercayaan multilevel antara pasukan, masyarakat lokal, dan institusi PBB, serta kajian mengenai strategi penguatan peran perwira Indonesia pada jabatan strategis PBB untuk memperkaya literatur defense studies dan hubungan internasional.
2. Saran Praktis. Secara praktis, PMPP TNI perlu meningkatkan presisi fasilitas latihan agar lebih mendekati realitas misi, memperkuat pelatihan bahasa asing dan teknologi sejak tahap seleksi awal, serta mempercepat pembaruan kurikulum melalui mekanisme feedback loop dari alumni misi. Dukungan psikologis bagi personel prapenugasan dan pascapenugasan perlu diperkuat untuk menghadapi tekanan misi jangka panjang. Selain itu, peningkatan partisipasi Wan-TNI serta penyusunan strategi diplomatik dan pembinaan karier perwira secara terintegrasi sangat penting untuk mendorong representasi Indonesia dalam jabatan strategis PBB, sehingga reputasi operasional dapat sejalan dengan pengaruh strategis Indonesia di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Armanto, A., Thamrin, S., Sahabuddin, Z. A., & Jati, S. P. (2024). Cultural adaptation and integration of Indonesian peacekeepers in Lebanon. *Multidisciplinary Reviews*. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024293>
- Asmoro, R. D., Saputro, G., Lumban Toruan, T. S., Anwar, S., & Simbolon, L. (2024). Troops Preparation Policy on A World Peace Mission. *Eduvest Greenvest Journal of Universal Studies*
- Astried, S., Sumertha, I. G. K. Y., & Saragih, H. J. R. (2021). Partisipasi female peacekeeper Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015 2017: Dampak terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4(3).



- Berita Satuan. PMPP TNI Bertugas Ciptakan Peacekeepers yang Profesional
<https://tniad.mil.id/pmpp-tni-bertugas-ciptakan-peacekeepers-profesional/>
- Biddle, B. J. (1986). "Recent Developments in Role Theory". *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67-92.
- Bilmes, L. J., Kennedy, H., Ibanez, S. V. S., Chaudhry, Y., & Hakim, J. R. (2021). *Strengthening Management of UN Peacekeeping Operations: A Review of UN Peacekeeping Operations Audits Faculty Research Working Paper Series*. <https://www.hks.harvard.edu/research-insights/publications?f%5B0%5D=publication+types%3A121>
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Campbell, S. P., & Cunningham, D. E. (2025). What Does this Mean for Global Governance? *United Nations Peace Operations*, 1-19.
- Chand, S. P. (2025). Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*. <https://doi.org/10.25082/aere.2025.01.001>
- Clausewitz, C. von. (1976). *On War*. Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. Princeton: Princeton University Press.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defense diplomacy: New roles for military cooperation assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran (Edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Daugirdas, K. (2019). Reputation as a disciplinarian of international organizations. *American Journal of International Law*, 113(2), 221-271.
- Department of Peace Operations. (2020). *United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM)*. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/3_military_-_1_united_nations_infantry_battalion_manual_unibam.pdf
- Edward III, G. C. (1973). *Implementing public policy: A framework of analysis*. Lexington Books.
- Evans, G. (2022). *Good international citizenship: The case for decency*. Monash Publishing.
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gray, C. S. (1999). *Modern Strategy*. Oxford: Oxford University Press.
- Hagel III, J., & Brown, J. S. (2005). *The Only Sustainable Edge: Why Business Models Must Open in the Global Arena*. Boston: Harvard Business School Press (Adapted to Defense Capability Framework in *Strategic Defense Journal*, 2018, 14(2), 89-105).
- Huda, A. V., Iswantono, I., & Kristin, L. (2024). Strategi Pertahanan Pada pengembangan Penggunaan kekuatan militer Dan Non Militer. *JiIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 10897-10901. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5876>
- Hurd, I. (2007). *After Anarchy: Legitimacy and Authority in the United Nations Security Council*. Princeton: Princeton University Press.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Jeffkins, F. (2003). Image theory and military reputation in defence diplomacy. *International Journal of Education and Social Science Research*.
- Jervis, R. (1970). *The Logic of Images in International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Karlsrud, J. (2019). "The UN at War: Progressive Militarization of UN Peace Operations and Its Implications". *International Peacekeeping*, 26(5), 525-546.

- Khoirunnisa, T. A., Jannah, R., Qonita, M., & Tjondrodewi, D. C. (2022). Kontribusi Indonesia dalam Peacekeeping Mission di Lebanon sebagai Implementasi Diplomasi Pertahanan. *Jurnal Transformasi Global*. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.01.6>
- Kusuma, & Husain, S. B. (2025). Total Diplomacy, Total History: Military Historians and The Indonesian Peace Corps. *Paramita: Historical Studies Journal*, 35(1), 81–89. <https://doi.org/dx.doi.org/10.15294/paramita.v35i1.45799>
- Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy: The Indirect Approach*. London: Faber and Faber.
- Martani, W. R., Sumertha, I. G., & Hidayat, E. R. (2022). Rematerial kesiapan operasional satuan tugas Satgas TNI Kontingen Garuda Konga United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 112–131.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). Los Angeles: SAGE Publications
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.
- Muniruzzaman, A. N. M. (2020). Defence diplomacy: A powerful tool statecraft. *CLAWS Journal*, Winter 2020.
- Murwanto, T. (2019). Pengembangan karir dan kompetensi perwira TNI dalam misi perdamaian PBB: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Doktor Manajemen*, 2(1).
- Nasution, S. (2007). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Pasaroan, D. S., Hadisancoko, R. E., & Santoso, B. (2023). Strategi penyiapan pasukan siaga operasi (standby force) tentara nasional indonesia dalam tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i2.10822>
- PMPP TNI. (2016). *Profil PMPP TNI: PPID Tentara Nasional Indonesia*. Portal PPID TNI. <https://ppid.tni.mil.id/view/32435571/profil-pmpp-tni.html>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. The Free Press
- Rathbun, B. (2009). *Trust in International Cooperation: International Security Institutions, Domestic Politics, and American Multilateralism*. Cambridge University Press
- Rathbun, B. C. (2011). *Trust in International Cooperation: National Security, Foreign Policy, and the Conundrum of Collective Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rathbun, B. C. (2012). "Before the Canal: Trust, Generalized Trust, and the Institutional Design of Multilateral Cooperation". *International Security*, 37(2), 52-87.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schmelzle, C., & Stollenwerk, E. (2018). "Virtuous or Vicious Circles? Performance Legitimacy and Trust-Building in Global Governance". *Global Governance*, 24(4), 513-532.
- Sihite, G. M., Malik, I., Sumertha, I. G. K. Y., & Widodo, P. (2024). Enhancing Indonesia's participation in UN peacekeeping missions through Indonesian civilian peacekeepers. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(5), 23–84.
- Sriyanto. (2022). Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.889>
- Sugiyanto, R., Riduan, M., Hermawan, Y., Louerens, J. T. A., & Primawanti, H. (2024). Indonesia's defense diplomacy in Lebanon through the peacekeeping force of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). *Indonesian Journal of Social Science Research*, 5(2), 621–630. <https://doi.org/10.11594/ijssr.05.02.22>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumertha, I. G. K. Y., Saragih, H. J. R., & Astried, S. (2021). Indonesian female peacekeepers' participation in UNIFIL. *Athens Journal of Mediterranean Studies*, 7(1), 29–44.

- Suparman, S. W. (2023). Tugas Dan Fungsi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tni Guna Meningkatkan Kesiapan Operasi Satuan Tugas Tni Dalam Rangka Memantapkan Diplomasi Militer Di Forum Internasional. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2417-2432>
- Till, G. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass.
- Turner, J. H. (2001). *Handbook of Sociological Theory*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- UN Peacekeeping. (2026). *Policy and guidance*. United Nations. <https://peacekeeping.un.org/en/policy-and-guidance>
- United Nations Conduct and Discipline Unit. (2021). *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse: Annual Report of the Secretary-General*. New York: United Nations.
- United Nations Department of Peace Operations. (2019). *Comprehensive Planning and Performance Assessment System (CPAS): Guidelines for Field Missions*. New York: DPO.
- United Nations. (2024). Operational readiness preparation policy for troop contributing countries in peacekeeping missions. UN Peacekeeping Guidance.
- United Nations. (2026). *Future of Peacekeeping*. United Nations. <https://peacekeeping.un.org/en/future-of-peacekeeping>
- Wagner, K., Tasker, H., Vahedi, L., Bartels, S. A., & Lee, S. (2022). Born between war and peace: Situating peacekeeper-fathered children in research on children born of war. *Frontiers in Political Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.945617>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawan, L. H., Sumadinata, R. W., & Tumulo, L. Y. (2024). Kapabilitas Satuan Tugas Indonesia battalion Kontingen Garuda (kongra) Menjaga Perdamaian di Lebanon Selatan (Kajian profesionalisme pelaksanaan Tugas Pokok TNI). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.55829>
- Yuninda, E., Yusgiantoro, P., Widodo, P., & Pedrason, R. (2024). Pengembangan konsep diplomasi pertahanan dan implementasinya dalam pengiriman Kontingen Garuda TNI pada misi operasi pemeliharaan perdamaian dunia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.